

RINGKASAN

PELAKSANAAN GAGASAN "INDONESIA INCORPORATED" DALAM USAHA PENINGKATAN EKSPOR NONMIGAS INDONESIA (Ajar Triharso, I. Basis Susilo, Vinsensio MA Dugis dan Gitadi Tegas, 1992.; 88 Halaman)

Dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas tidak lepas dari pembangunan dunia usaha. Diamanatkan oleh GBHN 1983 dalam Pelita IV dalam membangun dunia usaha agar pemerintah bekerjasama dengan KADIN. Setelah Pelita IV diselesaikan salah satu produknya adalah UU No. 1 tahun 1987 tentang KADIN dalam penataan dunia usaha. GBHN 1988 kemudian menindak lanjuti amanat tersebut untuk dilaksanakan pada Pelita V. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara operasional oleh Menteri Perdagangan pada Kabinet Pembangunan V dicanangkan gagasan "Indonesia Incorporated".

Untuk menemukan jawab atas pertanyaan bagai mana "Indonesia Incorporated" sebagai bentuk kebijaksanaan dilaksanakan adalah merupakan tujuan penelitian ini dilakukan.

Penelitian eksploratif ini menggunakan metode survai dalam pencarian data dan diskriptif dalam penyusunan hasilnya.

Pelaksanaan kemauan politik usaha peningkatan ekspor non-migas, ternyata semangat "Indonesia Incorporated" dari Menteri Perdagangan mewarnai hubungan pemerintah dan dunia usaha. Dunia usaha dengan antusias melakukan investasi modalnya ke dalam bidang-bidang yang menghasilkan komoditi ekspor non-migas. Sementara pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam bentuk peraturan (paket-paket kebijakan), sarana fisik (transportasi, komunikasi) dan juga lembaga-lembaga (BPEN, DPE, ITPC, etc.). Hasilnya dapat dilihat dengan kenaikan prosentase komposisi ekspor non-migas dibandingkan ekspor migas dalam contribusinya pada pendapatan dan tabungan nasional. Sejak tahun 1988 ekspor nonmigas dapat mengambil alih dominasi ekspor migas dalam komposisi ekspor Indonesia. Sekarang ekspor nonmigas mencapai lebih dari 60% dari seluruh pendapatan ekspor.

Untuk meningkatkan ekspor non-migas lebih lanjut perlu lebih menyempurnakan kelembagaan baik yang dibentuk oleh masing-masing maupun bersama-sama antara dunia usaha dan pemerintah terutama dalam hal pelaksanaannya (sumber daya manusia) dan perangkat keranya. Sehingga dapat terwujud Indonesia Incorporated lebih sempurna.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Unair
466/P4M/DPPM/L 3311/BBI/1992, 17 Juni 1992)

SUMMARY

THE IMPLEMENTATION OF THE "INDONESIA INCORPORATED" CONCEPT ON THE EFFORT TO SPEED UP INDONESIA'S NON-OIL EXPORTS (Ajar Triharso, I. Basis Susilo, Vinsensio MA Dugis and Gitadi Tegasi, 1992 : 88 Pages)

The effort to speed up the growth of non oil and gas export couldn't separated with the development of the business world. Officially message of the GBHN 1983 in order to develop the business world, government must cooperate with KADIN (Chamber of Commerce). After the Pelita IV was finished one of the products is the Act number 1 proclaimed in 1987 about KADIN the business world. GBHN 1988 then formulated in detail which had to be executed in the Pelita V. As the implementation of the policies the Minister of Trade of the Pembangunan V Cabinet Arifin M. Siregar proclaimed "Indonesia Incorporated" concept.

To search the answer the question how the "Indonesia Incorporated" concept as a governments policy was operated is one of the purposes of this research.

In this explorative research used survey method in collecting the data and descriptive in reporting the result.

The execution of the political will to rise up the non oil and gas export, actually the "Indonesia Incorporated" concept of the Minister of Trade coloured the relation between the government with the business world. The business world desirously invested their capitals in non oil and gas export product industries that they never thought before. Before this they used to invest in import substitution industries to supply the domestic market. Meanwhile the government prepared the economical infrastructures which facilitated both laws (packages of policies), goods (transportation, communication) and also institution (BPEN, DPE, ITPC etc.). The result could be seen in increasing the percentration of the non oil and gas export compared with the oil and gas in the national income and saving. Since 1988 non oil and gas export has replace the domination of oil and gas export in national export gain composition. Now the non oil and gas achieve more than 65 percent of the entire national export gains.

To make faster the speeding up the gain of non oil and gas export need perfection of the institutions which hold up by each or together between the government and the business world especially the implementor (human resources) and the hardware. So that should be shaped the Indonesia Incorporated more perfect.

(Rest. Inst. Faculty of Social and Political Science, Unair
466/P4M/DPPM/L 3311/BBI/1992, 17 June 1992)